

PERUBAHAN RENCANA KERJA

**KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Mojosari Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, April 2025

Pt. CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 196907291994031006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan II PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	 17
2.4 Reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	 27
 BAB III Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	 29 36
 BAB IV Penutup	 36
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan P-Renja	36
4.2 Kaidah kaidah pelaksanaan	37
4.3 Rencana Tindak Lanjut	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Mojosari merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

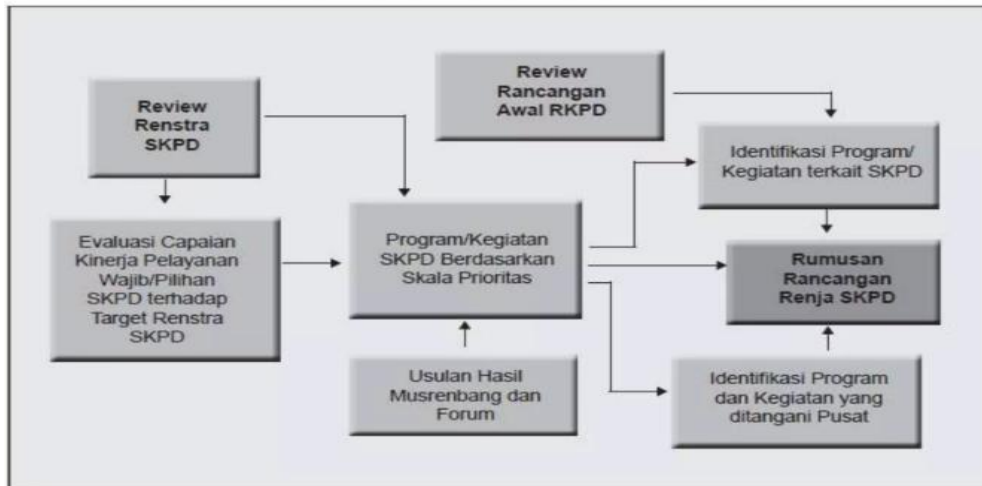
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Mojosari yang selanjutnya disingkat dengan P-Renja Kecamatan Mojosari adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Tahun 2025 – 2029.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Perubahan Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renja SKPD



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Mojosari yang berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Revocusing Kecamatan Mojosari.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
31. *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;*
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan RKPD;
35. Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
36. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.
37. SK tim penyusunan renja Kec. Mojosari Nomor 188.45/591.1/416-308/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode berjalan yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam periode berjalan yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan periode berjalan oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil
4. Langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja OPD, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Perubahan, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta perbedaan anggaran dan target kinerja otomatis juga berubah sesuai kebutuhan. Perubahan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa perubahan rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program

dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Mojosari pada tahun 2025 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Realisasi belanja pada Kecamatan Mojosari Bulan Mei Tahun 2025

NO	OPD/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp.)	PRESENTASE (%)
		(Rp)	S/D BLN INI	KEU
1	2	3	7	10
I	KECAMATAN MOJOSARI			
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000,00	9.572.000,00	38,29%
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40.000.000,00	14.970.000,00	37,43%
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	40.000.000,00	15.510.000,00	38,78%
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000,00	17.980.000,00	32,69%
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	140.000.000,00	21.925.000,00	15,66%
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.998.500,00	39,97%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.544.000,00	30,88%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.508.930.000,00	2.231.627.731,00	34,29%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	7.507.000,00	25,02%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.000.000,00	23.725.400,00	35,41%
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	10.945.000,00	18,24%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	1.375.000,00	22,92%
14	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000,00	23.885.375,00	39,81%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.000.000,00	9.000.000,00	26,47%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	25.397.300,00	31,75%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	69.438.000,00	38,58%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	30.142.000,00	37,68%
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	3.835.000,00	12,78%
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	6.448.200,00	32,24%
21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	336.188.300,00	113.319.900,00	33,71%
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	349.365.700,00	0,00	0,00%
23	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	367.758.000,00	122.130.227,00	33,21%
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	440.000.000,00	108.109.695,00	24,57%
25	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	367.758.000,00	0,00	0,00%
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	440.000.000,00	0,00	0,00%
27	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawahan	367.758.000,00	0,00	0,00%
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	440.000.000,00	0,00	0,00%
	JUMLAH	10.594.758.000,00	2.870.385.328,00	27,09%

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Mojosari sampai dengan Mei tahun 2025 berkenaan dalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 17 Kegiatan dimana berfungsi untuk mendukung operasional Kecamatan Mojosari dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan perencanaan. Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 2025 adalah sebesar Rp. 2.446.868.506.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Kemajuan keuangan sampai dengan Mei tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.572.000 dan Kemajuan fisik sampai dengan Mei tahun 2025 adalah sebesar 38%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan kelurahan dilaksanakan oleh 5 Kelurahan. Kemajuan keuangan sampai dengan Mei 2025 adalah sebesar Rp. 343.559.822 dan Kemajuan fisik sampai dengan Mei tahun 2025 adalah sebesar 8%.
4. Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemerintahan Desa, program kemajuan keuangan sampai dengan Mei tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 70.385.000 dan Kemajuan fisik sampai dengan Mei tahun 2025 adalah sebesar 25%.

Rincian analisis dapat dilihat dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

TABEL 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil P-Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Kecamatan Mojosari
2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan		
							I	II	
1	2	3	4	5	6	7	12	13	R
				R	R	K	R	R	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Indeks Kepuasan Masyarakat(%)			83			
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)	213.679.000	106.312.800	975	25.000.000	4.635.000	4.937.000
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)	213.679.000	106.312.800	975	25.000.000	4635000	4937000
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan(Laporan)			3	25.000.000	4.635.000	4.937.000
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa(Fasilitasi)	1.900.000.000	879.896.300	12	275.000.000	50.520.000	19.865.000

3	[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Fasilitas)	1.900.000.000	879.896.300	31	275.000.000	50520000	19865000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			8	40.000.000	10.390.000	4.580.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)			5	40.000.000	15.510.000	-
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			5	55.000.000	14.980.000	3.000.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			5	140.000.000	9.640.000	12.285.000
2	[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah(Nilai)	42.215.868.627	19.530.297.073	83	7.185.930.000	1.536.993.572	909.874.934
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Dokumen)	60.800.000	43.120.500	13	10.000.000	3798500	-256000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			12	5.000.000	2.498.500	- 500.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			16	5.000.000	1.300.000	244.000
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Laporan)	39.847.468.627	17.053.334.718	14	6.508.930.000	1416890672	814737059

4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			43	6.508.930.000	1.416.890.672	814.737.059
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(Persentase)	1.115.300.000	1.093.876.755	86	277.000.000	36503400	39934375
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	30.000.000	7.507.000	-
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	20.000.000	-	-
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			1	67.000.000	7.203.400	16.522.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	60.000.000	8.010.000	2.935.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			1	6.000.000	825.000	550.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	60.000.000	9.958.000	13.927.375
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	34.000.000	3.000.000	6.000.000
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor(Persentase)	444.900.000	650.757.250	88	260.000.000	57655500	37179800
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)			12	80.000.000	15.017.500	10.379.800
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	180.000.000	42.638.000	26.800.000

3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(Persentase)	552.300.000	533.133.350	100	130.000.000	22145500	18279700
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)			8	80.000.000	15.402.000	14.740.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3	30.000.000	1.985.000	1.850.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			14	20.000.000	4.758.500	1.689.700
		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)			1			
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Dokumen)	60.800.000	43.120.500	13	10.000.000	3798500	-256000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			12	5.000.000	2.498.500	- 500.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			16	5.000.000	1.300.000	244.000
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Laporan)	39.847.468.627	17.053.334.718	14	6.508.930.000	1416890672	814737059
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			43	6.508.930.000	1.416.890.672	814.737.059
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(Persentase)	1.115.300.000	1.093.876.755	86	277.000.000	36503400	39934375

4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	30.000.000	7.507.000	-
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	20.000.000	-	-
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			1	67.000.000	7.203.400	16.522.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	60.000.000	8.010.000	2.935.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			1	6.000.000	825.000	550.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	60.000.000	9.958.000	13.927.375
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	34.000.000	3.000.000	6.000.000
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor(Persentase)	444.900.000	650.757.250	88	260.000.000	57655500	37179800
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)			12	80.000.000	15.017.500	10.379.800
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	180.000.000	42.638.000	26.800.000
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(Persentase)	552.300.000	533.133.350	100	130.000.000	22145500	18279700

4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)			8	80.000.000	15.402.000	14.740.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3	30.000.000	1.985.000	1.850.000
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			14	20.000.000	4.758.500	1.689.700
2	[PROGRAM] 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat(Persentase)	24.123.815.000	6.694.421.750	81	3.108.828.000	-	343.559.822
3	[KEGIATAN] 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan(Kegiatan)	24.123.815.000	6.694.421.750	20	3.108.828.000	0	343559822

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Mojosari

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai IKM Kecamatan
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur

kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojosari
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			79%	80%	81%	81,5%	81%	82,30%	81,5%	82%	Memuaskan
2	Nilai Reformasi Birokrasi			51	52	-	-	-	-	-	-	Baik
3	Presentase Peningkatan Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			4%	5%	6%	6%	3%	3%	4%	4%	Baik
3	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti			82%	83%	84%	84%	85%	86%	82%	82%	Baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Mojosari diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Mojosari

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Mojosari bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Mojosari yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Mojosari;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Mojosari namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

6. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
7. Tingginya peluang pasar.
8. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
9. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Mojosari yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Mojosari untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir P-RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Proses penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dengan membandingkan Antara rancangan P-RKPD 2025 dengan hasil analisis kebutuhan. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C.31) sebagai berikut :

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Mojosari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76%	7.183.530.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Mojosari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76%	7.183.530.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	7.300.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	7.300.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	3 Dokumen	3.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	3 Dokumen	3.800.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan kinerja yang dapat tersusun	12 Laporan	3.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan kinerja yang dapat tersusun	12 Laporan	3.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	6.508.930.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	6.508.930.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Mojosari	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	6.508.930.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Mojosari	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	6.508.930.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	IP ASN Perangkat Daerah	85	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	IP ASN Perangkat Daerah	85	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Mojosari	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	45 Stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Mojosari	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	45 Stel	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mojosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mojosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	285.900.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	285.900.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	30.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	20.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	92.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	92.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	6.000.000
	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	60.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	60.000.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	17.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	17.900.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mojosari	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	85%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mojosari	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	85%	0
	Pengadaan Mebel	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	256.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	256.400.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	176.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	176.400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	125.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	125.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mojosari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	75.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mojosari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	75.600.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	30.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	19.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	19.400.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mojosari	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	23.500.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mojosari	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	23.500.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	25 Laporan	23.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	25 Laporan	23.500.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	3.436.609.500	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	3.436.609.500
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mojosari	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	13 Kegiatan	3.436.609.500	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mojosari	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	13 Kegiatan	3.436.609.500
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	349.365.700	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	349.365.700

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	336.188.300	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	336.188.300
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	439.087.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	439.087.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	260.002.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	260.002.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	440.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	440.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	279.625.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	279.625.500
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	439.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	439.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	261.464.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	261.464.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	440.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	440.000.000

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	191.877.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	191.877.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan,	81%	264.500.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan,	81%	264.500.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	37.900.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	37.900.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	37.900.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	37.900.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	52.300.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	52.300.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	136.400.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	136.400.000
	JUMLAH				10.908.139.500	JUMLAH				10.908.139.500

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Mojosari melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Mojosari secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	NIHIL				

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi P-Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil P-Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa perubahan rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Usulan Program Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SESUAI PAGU INDIKATIF	TAMBAH (KURANG)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.185.930.000	- 2.400.000	7.183.530.000
2	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	- 2.700.000	7.300.000
3	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	- 1.200.000	3.800.000
4	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	- 1.500.000	3.500.000
5	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.508.930.000	-	6.508.930.000
6	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.508.930.000	-	6.508.930.000
7	7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
8	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
9	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
10	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.000.000	8.900.000	285.900.000
11	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	-	30.000.000
12	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	-	20.000.000
13	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.000.000	25.000.000	92.000.000
14	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	-	60.000.000
15	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	-	6.000.000
16	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	-	60.000.000
17	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.000.000	- 16.100.000	17.900.000
18	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-		-
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			
18	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.000.000	- 3.600.000	256.400.000
19	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	-	80.000.000
20	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	- 3.600.000	176.400.000
21	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.000.000	- 5.000.000	125.000.000

22	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	- 4.400.000	75.600.000
23	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	-	30.000.000
24	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	- 600.000	19.400.000
25	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000	- 1.500.000	23.500.000
26	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.000.000	- 1.500.000	23.500.000
27	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25.000.000	- 1.500.000	23.500.000
28	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	275.000.000	- 10.500.000	264.500.000
29	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	275.000.000	- 10.500.000	264.500.000
30	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40.000.000	- 2.100.000	37.900.000
31	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	40.000.000	- 2.100.000	37.900.000
32	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000	- 2.700.000	52.300.000
33	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	140.000.000	- 3.600.000	136.400.000
34		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.365.700	-	349.365.700
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	458.392.300	- 122.204.000	336.188.300
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	439.087.000	-	439.087.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	368.671.000	- 108.669.000	260.002.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	440.000.000	-	440.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	367.758.000	- 88.132.500	279.625.500
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	440.000.000	- 1.000.000	439.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	367.758.000	- 106.294.000	261.464.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	440.000.000	-	440.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	367.758.000	- 175.881.000	191.877.000
			11.524.720.000	- 616.580.500	10.908.139.500

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mojosari, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dilingkup Kecamatan Mojosari, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program dan sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri no 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Tahun 2024 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Mojosari, April 2025
H. CAMAT MOJOSARI

YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Pembina
NIP. 196907291994031006